

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Mahkamah

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108.

Mahkamah Agung RI. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41.

### B. Buku

Arief, Barda Nawawi. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: FH UNDIP, 2024.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana, 2024.

Atmasasmita, Romli. *Teori Hukum Integratif dan Transformasi Ekonomi Halal*. Jakarta: Kencana, 2024.

Atmasasmita, Romli. *Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Era Digital*. Jakarta: Kencana, 2025.

Aulia, M. Zulfa. *Hukum Korporasi dan Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2024.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Islam dan Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.

Bahiej, Ahmad. *Hukum Pidana Umum: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.

Faal, M. *Penegakan Hukum Pidana dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Terjemahan Tim Penerjemah FH-UI. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2023.
- Lubis, Andi Fahmi, dkk. *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2023.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2024.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Dasar-Dasar Hukum dan Perlindungan Hak Asasi*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2024.
- Remmeling, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2024.
- Santoso, Topo. *Hukum Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2023.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. *Hukum Pidana: Dasar-Dasar Pertanggungjawaban Pidana*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2024.
- Sulasno, S. *Teori Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2025.

### **C. Jurnal Hukum dan Publikasi Ilmiah**

- Nasution, A. H., dkk. "Penegakan Hukum atas Label Halal Palsu: Studi Kasus Peredaran Produk Makanan Anak." *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 7, No. 1 (Januari 2026).
- Prahassacitta, Vidya. "Integritas Sistem Traceability dalam Menjamin Kepastian Hukum Produk Halal." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 2 (Februari 2026).
- Prahassacitta, Vidya. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 2 (Februari 2026).
- Putri, S. A. "Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim." *Jurnal Madani Hukum Islam*, Vol. 4, No. 1 (April 2025).
- Santoso, R. "Analisis Yuridis Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam UU Jaminan Produk Halal." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 2 (Maret 2026).

Santoso, R. "Kepastian Hukum dalam Regulasi Jaminan Produk Halal Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 2 (Maret 2026).

Santoso, R. "Perlindungan Hukum Konsumen dalam Ekosistem Ekonomi Digital Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 2 (Maret 2026).

Zafitriani, Difanti Ameliananda. "Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Produk Bersertifikat Halal di Indonesia." *El-Hisbah: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 4, No. 1 (Mei 2024).

"Dampak Label Halal Palsu Terhadap Kepercayaan Konsumen dan Reputasi Bisnis Lokal." *ResearchGate Publication*, November 2025.

#### **D. Naskah Akademik dan Laporan Resmi**

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Laporan Tahunan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal Nasional 2025*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). *Pedoman Pengawasan dan Pengenaan Sanksi bagi Pelaku Usaha*. Jakarta: Kemenag RI, 2026.

Komisi Hukum Nasional. *Naskah Akademik: Harmonisasi Sanksi Administratif dan Pidana dalam Regulasi Ekonomi*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2025.

Komisi Hukum Nasional. *Naskah Akademik dan Penjelasan Implementasi UU No. 1 Tahun 2023*. Jakarta: Kemenkumham RI, 2026.

Mahkamah Agung RI. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi*. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2025.

#### **E. Artikel Internet / Warta Informasi**

Arsyad, Taqdir. "Analisis Kesiapan Pelaku Usaha Mikro Menghadapi Wajib Halal 2026." Akses dari *usahamuslim.id*, 15 April 2026.

Arsyad, Taqdir. "Mulai 2026 Produk Tanpa Sertifikat Halal Dinyatakan Ilegal di Indonesia." Akses dari *usahamuslim.id*, 21 Oktober 2025.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Kewajiban Sertifikasi Halal Untuk Perlindungan Konsumen dan Kemudahan Pelaku Usaha." Akses dari *bpjph.halal.go.id*, 17 April 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Laporan Capaian Strategis dan Kepastian Layanan Halal 2026." Akses dari *bpjph.halal.go.id*, 18 April 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Peran Sertifikasi dalam Perlindungan Konsumen 2026." Akses dari *bpjph.halal.go.id*, 15 April 2026.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). "Siap-Siap! Produk Tak Sertifikasi Halal Bakal Kena 2 Sanksi Tegas Ini." Akses dari *CNBC Indonesia*, 29 Oktober 2024.

Kompas. "BPJPH Tegaskan Sektor Logistik Wajib Terapkan Sertifikasi Halal pada 2026." Diakses pada 14 April 2026.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. "Wajib Sertifikasi Halal untuk UMK Ditunda sampai 2026." Akses dari *Wantimpres RI*, 16 Mei 2024.

SIP Corp. "Label Halal Tanpa Sertifikat Resmi: Risiko Hukum yang Perlu Diwaspadai Pelaku Usaha." Akses dari *siprconsultant.id*, 19 Maret 2026.

Yuking & Co. Attorneys at Law. "Mulai Bulan Oktober 2026 Diberlakukan Wajib Sertifikat Halal Pada Seluruh Produk Makanan dan Minuman Di Indonesia." Diakses pada 17 April 2026.

